



KR-Surya Adi Lesmana

**MEMBELI PECI:** Sejumlah jemaah melihat dan mencoba beragam jenis peci di depan pintu masuk Masjid Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta, usai ibadah Salat Jumat, Jumat (10/5/2024). Peci dengan beragam bentuk dan jenis maupun ukuran ditawarkan mulai Rp 20.000 tersebut laris dibeli para jemaah.

## Hapus Separator Ring Road, Tunggu Kajian Teknis

**YOGYA (KR)** - Meski pembahasan rencana penghilangan separator (pembatas jalur) di Jalan Lingkar (Ring Road) DIY segera dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, namun Dinas Perhubungan (Dishub) DIY belum mengetahui detail rencana penghapusan separator tersebut.

"Rencana penghilangan pembatas jalan di Ring Road sempat muncul dari Polda DIY. Tujuannya untuk menambah ruang jalan sehingga bisa memuat lebih banyak kendaraan dan meminimalisasi kecelakaan lalu lintas. Tapi soal wacana itu belum ada komunikasi dengan kami. Itu kan keinginan Polda DIY untuk melakukan kajian menghilangkan separator di Ring Road. Kami akan tunggu saja kajiannya seperti

apa," kata Plh Kepala Dinas Perhubungan DIY Sumariyoto di Yogyakarta, Jumat (10/5). Sumariyoto mengungkapkan, status Jalan Ring Road yang merupakan Jalan Nasional kewenangannya ada di pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJJN). Oleh karenanya kajian tersebut akan dilakukan langsung dari pusat bukan Pemda DIY. Tentunya dalam melakukan kajian tersebut harus lengkap. Kelebihan

dan kekurangan dari penghapusan separator jalan itu harus diketahui sebelum dilaksanakan. Setelannya rekomendasi hasil kajian baru bisa dilihat sejauh mana pentingnya wacana itu diterangkan.

"Saya kira mangga saja kalau mau melakukan kajian. Tentunya dalam melakukan kajian tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR karena itu terkait dengan Jalan Nasional. Jadi kalau kami sifatnya lebih pada koordinasi saja antarmereka dan sekadar pemberitahuan," ungkapnya.

Direktur Lalu Lintas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurzilal menyatakan, pekan depan rencananya pembahasan soal penghilangan separator

Ring Road akan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, termasuk kalangan akademisi. Rencana itu muncul karena keberadaan separator sudah lama, sementara perkembangan transportasi sekarang sudah sangat pesat, jadi butuh penyesuaian.

"Kalau tahap awal uji coba peniadaan separator itu dimulai di Monjali sampai Condongcatur selama satu bulan. Dengan begitu badan jalan akan semakin lebar dan dimungkinkan bisa memperkecil risiko kecelakaan lalu lintas. Nantinya selain melakukan uji coba, kami juga akan mengedukasi masyarakat sambil melihat bagaimana kondisi uji cobanya," paparnya. (Ria)-f

## DARI WILAYAH TERISOLASI DI LUWU TNI-Polri Evakuasi Warga Sakit

**MAKASSAR (KR)** - Unsur TNI dan Satbrimobda Polda Sulawesi Selatan berjibaku mengevakuasi sejumlah warga yang sakit termasuk stroke dari wilayah terisolasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Unsur Polri dan TNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan di wilayah bencana tanah longsor Kabupaten Luwu, terus melakukan upaya evakuasi di daerah terisolasi.

Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Heru Novianto di Makassar, Jumat (10/5) mengatakan, evakuasi berlangsung dramatis lantaran personel melakukan evakuasi terhadap beberapa warga yang menderita sakit hingga stroke.

"Evakuasi warga menuju tempat terdekat dari lokasi helipad persiapan menuju Posko Induk Belopa. Kita evakuasi tadi ada satu warga sakit (stroke), dua lumpuh jadi kita gendong, dan dua balita," ujarnya.

Selain kondisi korban terdampak bencana yang sakit, proses evakuasi berjalan dramatis lantaran para personel harus melawati jalur terjal dan berbahaya melewati sisa-sisa material longsor.

Daerah terisolasi itu yakni wilayah Desa Tibussan dan Desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sul-

sel. Disini, para personel Korps Brigade Mobil (Brimob) harus menempuh puluhan kilometer dengan berjalan kaki untuk melakukan evakuasi.

Sementara itu Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) II TNI AU Marsda TNI Budhi Achmadi mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mengevakuasi 143 korban banjir di Luwu, Sulawesi Selatan. Mayoritas dari 143 korban banjir dan tanah longsor itu terdiri perempuan, anak-anak dan lansia yang membutuhkan pertolongan medis.

Mereka dievakuasi oleh tim dari TNI AU yang telah bersiaga sejak hari pertama bencana berlangsung, Jumat (3/5) menggunakan helikopter Caracal H-225M. Tidak hanya mengevakuasi korban banjir, helikopter milik TNI AU juga telah mendistribusikan bantuan pangan seberat 15 ton kepada para korban banjir di Sulsel.

Jajaran Marinir TNI AL juga turut serta dalam melakukan proses evakuasi korban banjir di Sulsel. Mereka telah mengevakuasi di 13 kecamatan yakni Suli, Latimojong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Kamanre, Belopa, dan Belopa Utara. (Ant/San)-d

## IKUT PILKADA 2024 Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur

**JAKARTA (KR)** - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada Serentak 2024. Caleg terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah anggota DPR/DPD/ DPRD untuk jajarannya provinsi/kabupaten/kota Pemilu 2019 dan kembali terpilih dalam Pemilu 2024.

"Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/5).

Ia menjelaskan, caleg

terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah anggota DPR/DPD/ DPRD untuk jajarannya provinsi/kabupaten/kota Pemilu 2019 dan kembali terpilih dalam Pemilu 2024. "Maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki," jelasnya.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 12/PUU-XXII/2024 penting untuk KPU memperlakukan calon anggota DPR/DPD/ DPRD jajarannya provinsi/kabupaten/kota. Kemudian, tidak ada larangan untuk calon anggota DPR/DPD/ DPRD jajarannya provinsi/kabupaten/kota untuk dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada, misalnya. "Sekali lagi yang wajib mundur adalah anggota," ucap Hasyim. (Ant/Obi)-f

mi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Hasyim pun menegaskan frasa 'jika telah dilantik secara resmi menjadi'. Untuk itu, tidak ada aturan tentang pelantikan serentak bagi calon anggota DPR/DPD/ DPRD jajarannya provinsi/kabupaten/kota.

Kemudian, tidak ada larangan untuk calon anggota DPR/DPD/ DPRD jajarannya provinsi/kabupaten/kota untuk dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada, misalnya. "Sekali lagi yang wajib mundur adalah anggota," ucap Hasyim. (Ant/Obi)-f

## USAI VIRAL DI MEDSOS Kepala Kantor UPBU Kolaka Dibebastugaskan

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membebastugaskan Asri Damuna, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sanga Nibandera Kolaka di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Asri dibebastugaskan usai viral di media sosial (medsos) saat menggoda Youtuber asal Korea Selatan.

"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan video viral yang melibatkan Asri Damuna. Yang bersangkutan telah dibebastugaskan guna memudahkan penyelidikan dan tindakan lebih lanjut," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/5).

Menurut Adita, pembebastugasan tersebut dilakukan guna memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait video Asri yang tengah viral media sosial. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memerintahkan agar kebenaran berita yang tengah viral tersebut

segera diurut dan diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah. Untuk itu, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tengah dilakukan.

"Jika terbukti benar, artinya yang bersangkutan tidak dapat menjaga maruah sebagai aparatur sipil negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal terkait hal tersebut," kata Adita.

Sebelumnya, sebuah video viral di masyarakat. Dalam video tersebut, seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah yang tengah berlibur di Manado Sulawesi Utara, didatangi oleh pria yang diduga adalah Asri Damuna. Dalam video tersebut, terduga Asri yang mengaku bernama Albert, mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Jiah mengunggah konten tersebut di akun media sosialnya.

"Kemenhub berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kami meminta kepada seluruh ASN agar dapat menjaga maruah dan etika baik sebagai pegawai pemerintah," tandas Adita. (Ant/Has)-d

## MASYARAKAT BISA KRITIK PEMERINTAH Perlu Ada Ruang 'Check and Balances'

**JAKARTA (KR)** - Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengingatkan, perlu ada ruang *check and balances* dari partai politik maupun masyarakat sipil, dalam suatu pemerintahan. Maksud dari *check and balances* yang diucapkan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah upaya saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.

"Masyarakat sipil bisa, lho, memberikan catatan-catatan kritis. Kita harus membuka ruang *check and balances*," ucap Ganjar usai acara peringatan ulang tahun ke-10 relawan Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Ganjar mengingatkan, pihak dalam dan luar pemerintahan bisa saja mengganggu jalannya proses pemerintahan. Walaupun demikian, bukan berarti pemerintah mengabaikan pendapat dari pihak lain, termasuk masyarakat sipil. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada *check and balances* untuk memastikan, pemerintahan berjalan aman dan lancar.

"Umpama, kita ingin ciptakan pemerintah bersih, tetapi korupsi di dalam. Itu

mengganggu. Hal yang di luar, jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Jadi, *check and balances* akan berjalan," tegasnya.

Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah. "Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar, Senin (6/5) lalu.

Meski begitu, ia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini.

Ia mengatakan, langkah yang ditempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik, sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat. Ganjar juga menilai tak perlu ada cibermencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen. "Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," ucap Ganjar. (Ant)-f

## DI PUNCAK GUNUNG ILE LEWOTOLOK Terjadi 94 Kali Gempa Embusan

**KUPANG (KR)** - Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Ile Lewotolok di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan, terhitung sejak Jumat (10/5) pukul 00.00 WITA hingga Jumat (10/5) pagi pukul 06.00 WITA, terjadi gempa embusan sebanyak 94 kali.

"Ada 94 kali aktivitas kegempaan embusan terjadi di puncak Gunung Lewotolok," kata petugas pembuat laporan hasil pengamatan Gunung Ile Lewotolok Fajaruddin M Balido dari Lembata, Jumat.

Ia menjelaskan, dari 94 kali gempa embusan itu menimbulkan amplitudo berkisar dari 3,3 hingga 15,7 milimeter dengan durasi berada pada kisaran 31 hingga 272 detik. Selain itu terjadi juga aktivitas kegempaan berupa tremor non-har-

monik sebanyak enam kali dengan amplitudo 5,4 hingga 7,8 milimeter dan lama gempa berkisar dari 315 hingga 657 detik.

Fajaruddin menambahkan, secara visual gunung terlihat jelas dan asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, sedang, dan tinggi, dengan ketinggian berkisar dari 100 hingga 300 meter di atas puncak kawah.

Status gunung tersebut, lanjutnya, juga masih dalam status Level III atau Siaga. Lalu laporan mingguan yang disampaikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) disebutkan aktivitas vulkanik di gunung itu mengalami peningkatan.

Pada periode pengamatan 1-7 Mei 2024 Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) mencatat jumlah gempa vulkanik dangkal sebanyak 220 kali dan gempa vulkanik dalam sebanyak 153 kali, meningkat dibandingkan dengan periode pengamatan satu minggu sebelumnya yakni 23-30 April 2024 dengan 22 gempa vulkanik dangkal dan 90 gempa vulkanik dalam.

Karena itu Badan Geologi pun merekomendasikan masyarakat Desa Lamatokan dan Jontona agar mewaspadaai potensi ancaman bahaya guguran atau longsor lava dan awan panas dari bagian timur puncak atau kawah gunung.

Sedangkan masyarakat Desa Jontona dan Todanara direkomendasikan agar tidak memasuki wilayah sektoral selatan dan tenggara sejauh tiga kilometer dari pusat aktivitas gunung. (Ant/San)-d

## FRAKSI PKS DPR RI KE SWISS Temui WHO Ajak Selamatkan Palestina

**JAKARTA (KR)** - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendatangi Kantor Pusat World Health Organization (WHO) di Jenewa Swiss, untuk mengajak organisasi kesehatan dunia itu membantu menyelamatkan warga Palestina.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 demi melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini, WHO punya peran strategis dalam kerangka kerja sama global.

"Kesehatan telah menjadi isu kemanusiaan global, bukan lagi isu nasional suatu negara atau kawasan. Oleh karena itu, membutuhkan kerja sama dan kolaborasi di antara negara-negara di dunia," kata Ja-

zuli dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (10/5).

Dalam kunjungannya Rabu (8/5) waktu setempat, ia mengajak WHO untuk mewujudkan dunia yang sehat dan sejahtera bagi semua orang dari segala ancaman penyakit yang bersifat pandemik maupun akibat konflik dan peperangan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Syura

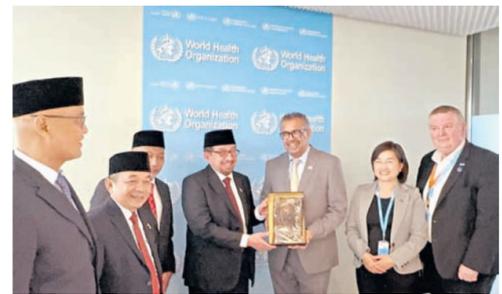
PKS Salim Segaf Aljufri menuntut WHO lebih determinatif dalam melakukan aksi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa rakyat sipil korban perang. Dalam konteks ini, peran WHO juga sangat vital dalam membela hak-hak kesehatan masyarakat dunia.

Masyarakat Palestina yang mengungsi akibat konflik di kamp-kamp pengungsian, menurutnya,

bisa meninggal perlahan karena minimnya akses makanan, air, layanan kesehatan dan sanitasi, sehingga wabah penyakit menyebar di tengah-tengah kehancuran lingkungan dan tempat tinggal mereka.

"Mereka tewas di tangan mesin perang agresor dan mayoritas tidak tertolong, karena sistem kesehatan telah lumpuh total, rumah sakit dihancurkan, tidak ada obat-obatan, tidak ada dokter, bahkan tidak ada tenaga medis yang tersisa," papar Salim.

Ia berharap ke depannya bisa melihat dunia yang lebih damai, tertib dan berkeadilan, nyaman dan aman untuk seluruh warganya. Melalui forum pertemuan ini, pihaknya mendorong agar WHO bersuara lebih keras dan bertindak lebih maju untuk menyelamatkan nyawa manusia di Gaza Palestina. (Ant/Obi)-d



KR-fraksi.pks.id

**Delegasi Fraksi PKS DPR RI diterima di Kantor Pusat WHO di Jenewa, Swiss.**